

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hampir di seluruh dunia, kecenderungan kecurangan akuntansi telah berkembang secara luas pada beberapa dekade terakhir. Dampak dari kecurangan tersebut sangat besar dan terbukti merugikan banyak pihak. Menurut Sukmawati (2016) kecurangan diindikasikan oleh adanya bentuk tindakan dan kebijakan yang secara sengaja bertujuan untuk menipu atau memanipulasi, sehingga merugikan pihak lain. Adapun *Associations of Certified Fraud Examinations* (2014) mengklasifikasikan kecurangan akuntansi dalam tiga kategori utama yaitu kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) dan korupsi (*corruption*).

Salah satu bentuk kecurangan yang sering terjadi di Indonesia adalah korupsi. Kecurangan akuntansi bisa menjadi istilah yang setara dengan korupsi, dalam hal pengertian dan penggunaan istilahnya (Soepardi, 2007). Keduanya melibatkan semua atau beberapa elemen yang terdiri atas pengungkapan fakta yang tidak benar, pelanggaran aturan atau amanah yang dipercayakan, dan penghilangan fakta-fakta kritis.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah setiap orang baik pejabat maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menghadapi bahaya akan kecenderungan kecurangan akuntansi dibuatlah berbagai kebijakan yang di mana hal tersebut didukung oleh semua pihak (Thoyibatun, 2012). Sehingga kecenderungan kecurangan akuntansi butuh untuk ditanggulangi. Antara lain, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan juga dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Banyak pihak secara serius berkeinginan untuk menangani kecenderungan kecurangan akuntansi yang di mana dibutuhkan lingkungan yang kondusif.

Peraturan dan Undang-Undang tersebut sebagai dasar yang mendorong semua kalangan masyarakat untuk patuh terhadap peraturan dan tidak melakukan tindakan kecurangan akuntansi. Selain peraturan tersebut, dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan mengenai kewajiban kita untuk taat dan patuh dalam hal menyampaikan sesuatu dengan sebenarnya, yang mana pada Al-Qur'an surah *An-Nisa'* ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S.An-Nisa’:58)

Ayat tersebut menjelaskan mengenai kewajiban seorang pegawai yang haruslah bersifat amin (dapat dipercaya dalam mengemban amanat) dan adil dalam bertindak dan memutus suatu perkara yang ditanganinya. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menyampaikan amanat secara sempurna, utuh, tanpa mengulur-ulur atau menunda-nundanya kepada yang berhak menerimanya. Seorang pegawai sebagai pemegang amanah dalam hal mengatur laporan keuangan haruslah melaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Kenyataannya kecenderungan kecurangan akuntansi masih saja terjadi dan mengalami peningkatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Perkembangan ini menimbulkan kekecewaan pada masyarakat, di mana seharusnya lembaga publik tersebut bersifat jujur dan tertib, selain itu keterlibatannya dalam hal membangun perkembangan perekonomian Negara. Perguruan tinggi memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga atau instansi publik sehingga diupayakan bebas dari kecenderungan kecurangan akuntansi tersebut (Thoyibatun, 2012).

Adapun perilaku tidak etis bisa berpengaruh terhadap penyimpangan-penyimpangan yang sering terjadi di Indonesia selain adanya kecurangan-kecurangan akuntansi. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Thoyibatun (2012), perilaku yang menyalahgunakan jabatan, sumber daya organisasi, kekuasaan, dan perilaku yang tidak berbuat apa-apa sehubungan dengan jabatan dan kekuasaannya dikatakan sebagai perilaku tidak etis dalam penelitian ini.

Pengawasan yang kurang dari seorang manajer perusahaan dapat menyebabkan karyawannya melakukan tindakan penyimpangan dan itu tentu saja

dapat merugikan perusahaan itu sendiri dan juga orang lain. Adapun penyimpangan yang dilakukan karyawan dikarenakan kompensasi yang diterimanya tidak sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan di dalam perusahaan, dan adanya pelanggaran terhadap aturan akuntansi yang telah disepakati serta adanya asimetri dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Agar hal tersebut dapat berkurang, maka organisasi tersebut haruslah mampu mendorong karyawannya untuk dapat berperilaku etis di dalam maupun di luar perusahaan (Shintadevi, 2015).

Penanganan kecenderungan kecurangan akuntansi haruslah dilakukan secara serius dan dengan cara yang lebih baik lagi. Mengidentifikasi sebab-sebab timbulnya kecenderungan kecurangan akuntansi merupakan hal penting yang dapat dilakukan, karena dengan informasi yang didapatkan tentang penyebab yang dapat memicu terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi kita dapat merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasinya (Thoyibatun, 2012).

Sehingga dari beberapa penelitian terdahulu peneliti melakukan kompilasi atas penelitian sebelumnya oleh Wilopo (2006), Thoyibatun (2012), Shintadevi (2015), dan Sukmawati (2016). Hasil penelitian Wilopo (2006) menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan hipotesis dan teori serta hasil penelitian sebelumnya, di mana kompensasi yang sesuai yang diberikan tidak secara signifikan memengaruhi terjadinya perilaku tidak etis dan tidak secara signifikan mengurangi taraf terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMN dan perusahaan *go public* yang ada di Indonesia. Sedangkan hasil penelitian Thoyibatun (2012) menunjukkan hasil yang berbeda di mana kompensasi dapat

memengaruhi terjadinya perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi pada Perguruan Tinggi Negeri, di mana hal tersebut terjadi dikarenakan karakteristik Perguruan Tinggi Negeri berbeda dari perusahaan yang orientasinya mencari laba.

Penelitian ini berangkat dari *research gap* yang menunjukkan tidak adanya penurunan perbuatan kecenderungan kecurangan akuntansi walaupun telah diberikan kompensasi yang sesuai oleh perusahaan. Karena, tidak sesuainya antara keinginan manajemen perusahaan dengan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan, dan juga adanya anggapan bahwa dengan melakukan tindakan tidak etis ataupun kecurangan akuntansi akan mendapatkan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kompensasi yang diterima. Selain itu, belum adanya sistem kompensasi yang dijadikan sebagai dasar acuan secara nasional di Indonesia.

Peneliti termotivasi melakukan penelitian ini karena penelitian terkait kecenderungan kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi, dan asimetri informasi menggunakan intervening atau melalui perilaku tidak etis masih jarang dilakukan. Selain itu, masih tingginya tingkat kecurangan akuntansi di perguruan tinggi dengan banyaknya kasus yang berhasil terungkap. Menurut Damayanti (2016) transaksi-transaksi yang diurus oleh pengelola aset di bagian keuangan dan akuntansi pada perguruan tinggi masih rawan terjerat kasus korupsi karena sistem pengendalian internal universitas yang masih lemah.

Indonesia Corruption Watch (ICW) telah melakukan pemantauan di perguruan tinggi untuk memantau terjadinya korupsi yang dilakukan dalam

rentang waktu 10 tahun terakhir. Sejak tahun 2006 hingga Agustus 2016, ICW mencatat terdapat sedikitnya 37 kasus yang melibatkan perguruan tinggi. Dari kasus korupsi yang ditemukan tersebut, terdapat 65 pelaku korupsi yang melibatkan civitas akademika, pegawai pemerintah dan pihak swasta.

Sepanjang tahun 2010, terdapat banyak masalah yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan perguruan tinggi yang berhasil diungkap oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Adanya penemuan biaya perjalanan dinas yang tidak wajar senilai Rp 18,5 miliar yang berhasil diungkap oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Selain itu, kasus korupsi yang melibatkan mantan Wakil Rektor Universitas Indonesia (UI) Tafsir Nurchamid yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 21 miliar atas proyek pengadaan instalansi teknologi informasi Perpustakaan Pusat UI pada tahun anggaran 2010-2011 (Shintadevi, 2015).

Inspektur Jenderal Kemendikbud Haryono Umar menjelaskan bahwa di lingkungan perguruan tinggi masih banyak titik rawan yang dapat dimanfaatkan koruptor yang di mana penerimaan kampus atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) cukup besar sekitar Rp 11-12 miliar per tahunnya yang dicatat di semua perguruan tinggi yang mana paling berpotensi untuk dikorupsi. Korupsi terkait PNBP melibatkan mantan Rektor Universitas Jambi yaitu Kemas Arsyad bersama dengan bendaharanya diketahui terlibat korupsi yang merugikan Negara sebesar Rp 1,2 miliar terkait honor dosen yang senilai 25 miliar pada program studi kedokteran Universitas Jambi periode anggaran 2006-2009 (Shintadevi, 2015).

Selain itu, tingkat korupsi Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki peringkat ke 10 dari 33 provinsi di Indonesia. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Daerah Istimewa Yogyakarta penanganan dan penyelesaian kasus-kasus korupsi masih belum terlaksana dengan baik, yang di mana ditandai dengan masih banyaknya kasus korupsi yang dihentikan tanpa adanya penyelesaian dan cenderung berlarut-larut dalam penanganannya (Pramesti, 2010).

Informasi tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi di DIY masih terbilang tinggi dan ini juga memungkinkan terjadinya tindakan kecurangan akuntansi pada Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan karena para pemangku jabatan yang seharusnya dapat dipercaya justru memanfaatkan jabatannya untuk perbuatan yang salah. Kasus korupsi sudah merajalela di Indonesia, sehingga perlu ditanggulangi mengingat di Indonesia, pendidikan anti korupsi masih sangat kurang sehingga diperlukan keterlibatan pemerintah untuk dijadikan tugas tambahan. Dengan banyaknya kasus korupsi yang terungkap, sangat penting adanya upaya-upaya dalam penanggulangannya, maka peneliti termotivasi untuk melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan.

Terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang mana perbedaannya terletak pada bagian obyek penelitian dan alat analisis yang digunakan. Obyek dalam penelitian ini adalah Perguruan Tinggi Swasta terakreditasi institusi A di Kopertis wilayah 5 Daerah Istimewa

Yogyakarta dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah program *SEM-AMOS*. Sedangkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang dijadikan obyek penelitian adalah BUMN, perusahaan *go public*, Perguruan Tinggi Negeri, dan sektor pemerintahan di beberapa kabupaten di Indonesia. Alat analisis yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan program *SPSS 15.0* dan juga *SEM-PLS*.

Alasan peneliti menggunakan program *SEM-AMOS* adalah karena penelitian ini mencoba untuk memperluas penelitian sebelumnya dengan menggunakan sampel yang lebih besar. Sedangkan alasan pemilihan obyek penelitian di Perguruan Tinggi Swasta ini karena memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan yang tujuan utamanya mencari laba. Selain itu, perguruan tinggi merupakan institut pendidikan yang diharapkan masyarakat mampu menjadi sumber kekuatan dalam mengatasi permasalahan akuntansi tersebut dalam upaya untuk menuju akuntabilitas yang lebih transparan.

Pengembangan model faktor dalam penelitian berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dengan penggabungan dari beberapa studi yaitu pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi, dan asimetri informasi sebagai proksi dari sistem yang ada di institut pendidikan. Penelitian ini juga dikembangkan dengan membuat model adanya variabel *intervening* yaitu perilaku tidak etis. Dijadikannya perilaku tidak etis sebagai variabel *intervening* karena diduga mampu memengaruhi hubungan kausal antara variabel dependen dengan variabel independen tidak bersifat langsung, perilaku

tidak etis merupakan proksi dari perilaku yang dalam hal ini responden dalam institusi pendidikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, KETAATAN ATURAN AKUNTANSI, KESESUAIAN KOMPENSASI, DAN ASIMETRI INFORMASI TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI MELALUI PERILAKU TIDAK ETIS SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*** (Survey pada Perguruan Tinggi Swasta Terakreditasi Institusi A di Kopertis Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta)”.

B. Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah ada, penelitian ini akan menganalisis pengaruh pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi, dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis. Dengan keterbatasan waktu, biaya dan kemampuan menjadikan peneliti memberi batasan terkait waktu dan lingkup penelitian.

Batasan lingkup penelitian ini yaitu penelitian hanya dilakukan peneliti di Daerah Istimewa Yogyakarta karena sesuai latar belakang yang ada di mana tingkat korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki peringkat ke 10 dari 33 provinsi di Indonesia. Kecenderungan kecurangan akuntansi di Daerah Istimewa Yogyakarta masih terbilang tinggi dan memungkinkan terjadinya tindakan kecurangan akuntansi pada Perguruan Tinggi Swasta. Sehingga dalam penelitian

ini hanya memilih empat Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi institusi A untuk dijadikan obyek. Terkait dengan sampel, penelitian ini menggunakan entitas akuntansi yang memiliki wewenang dalam hal penggunaan anggaran yang dianggarkan dan berkewajiban menyelenggarakan akuntansi serta menyusun laporan pertanggung jawaban.

Sedangkan batasan waktu pada penelitian ini yaitu penelitian hanya dilakukan selama satu bulan yaitu 1 Februari 2018 hingga 2 Maret 2018. Hal tersebut karena keterbatasan waktu peneliti, di mana surat pemberian izin riset baru diterima peneliti tanggal 1 Februari 2018 sehingga baru dapat menyebarkan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan kepada responden yang tersebar di empat Perguruan Tinggi Swasta dalam penelitian ini memungkinkan peneliti menunggu 3 hari hingga 5 hari untuk pengambilan kuesioner tiap responden dan penyebaran tidak dapat dilakukan serentak dalam satu waktu untuk keempat Perguruan Tinggi Swasta tersebut.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah yaitu suatu pernyataan mengenai fenomena atau keadaan maupun konsep yang membutuhkan solusi serta pemecahan dengan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang sehingga perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Perguruan Tinggi Swasta?
2. Seberapa besar pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan pada Perguruan Tinggi Swasta?

3. Seberapa besar pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Perguruan Tinggi Swasta?
4. Seberapa besar pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Perguruan Tinggi Swasta?
5. Seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis pada Perguruan Tinggi Swasta?
6. Seberapa besar pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan melalui perilaku tidak etis pada Perguruan Tinggi Swasta?
7. Seberapa besar pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis pada Perguruan Tinggi Swasta?
8. Seberapa besar pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis pada Perguruan Tinggi Swasta?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Perguruan Tinggi Swasta.

2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Perguruan Tinggi Swasta.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Perguruan Tinggi Swasta.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Perguruan Tinggi Swasta.
5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis pada Perguruan Tinggi Swasta.
6. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis pada Perguruan Tinggi Swasta.
7. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis pada Perguruan Tinggi Swasta.
8. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis pada Perguruan Tinggi Swasta.

E. Manfaat Penelitian

Kontribusi dari penelitian ini yang dapat diberikan antara lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat menjadi sumber referensi dan sebagai sumbangan konseptual bagi peneliti selanjutnya. Hasil penelitian dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah kecurangan akuntansi.
- b. Untuk memperkuat secara langsung teori akuntansi terkait kepatuhan dalam pelaporan keuangan dengan mengikuti peraturan yang telah disepakati.
- c. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan semua ilmu yang didapat selama di perguruan tinggi serta dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan operasional.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak akademis atau Perguruan Tinggi harapannya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merancang sistem pengendalian internal dengan lebih baik, guna

membentuk budaya organisasi yang sehat dan mendukung karyawan membentuk moralitas individu yang baik.

- b. Bagi masyarakat harapannya penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menyikapi kasus kecurangan akuntansi yang terjadi khususnya di bidang pendidikan serta sebagai sarana menambah pengetahuan akuntansi.
- c. Bagi peneliti lain untuk dijadikan literatur dalam penelitian selanjutnya dengan tetap mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini.